

Pelestarian Jimpitan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang

Rakhmat Dwi Pambudi Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Abstract

The concept of community empowerment is the process of preparing the community with various resources, opportunities, knowledge, and expertise to increase the capacity of the community in determining the future, as well as participating and influencing life in the community itself. One form of community participation in RT 04 RW 01, Patemon, Gunung Pati, Semarang City in development is through a "jimpitan" program. "Jimpitan" is a tradition of community self-help program where the community voluntarily gives money or rice to the designated officers and usually the collection time is every day in conjunction with night watch patrols. This activity is an example of a village community empowerment program, where the community has an active role in working together to collect voluntary contributions and manage and process the results in the form of physical and non-physical development in their respective areas. In addition to utilizing money from the "jimpitan", the collection process also has a positive impact, namely improving family attitudes and mutual cooperation in the community amid the rapid development of social media, creating harmony, peace, and increasing community participation in protecting and developing the environment. The tradition of "jimpitan" is very worth keeping because of the many positive effects it poses.

Keywords

Fundraising; Community Empowerment; Environmental Development

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan lingkungan yang tenteram, rukun, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan setiap masyarakat. Kebutuhan tersebut akan terus menerus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Tidak terciptanya lingkungan yang tenteram, rukun, damai, demokratis, akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman diantara warga masyarakat. Sedangkan apabila kebutuhan akan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketertinggalan.

Pemerintah sudah membuat berbagai macam program pembangunan, baik fisik yang berupa infrastruktur maupun pembangunan non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia, namun hal tersebut tentunya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan

obyek dari pembangunan itu sendiri, harus ikut berperan aktif dalam membangun kehidupan. Salah satu upaya yang dapat masyarakat lakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri didalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pada penerapannya, dukungan dan juga peran aktif atau partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberlangsungan suatu program yang berbasis pada suatu pemberdayaan. Aktor yang menjadi pusat dalam pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga masyarakat memiliki peran yang besar dalam proses pemberdayaan. Peran aktif pada masyarakat ini bertujuan membangun masyarakat yang mandiri, sehingga masyarakat secara bersama-sama dapat menggali potensi-

potensi yang mereka miliki, mulai dari mengembangkan sumber daya manusia, sampai dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal.

Dalam program pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan aspek terpenting dalam kesuksesan suatu program. Salah satu bentuk partisipasi warga masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dalam pembangunan yaitu melalui program jimpitan.

Jimpitan adalah tradisi program swadaya masyarakat dimana masyarakat secara suka rela memberikan uang atau beras kepada petugas yang ditunjuk atau warga yang bertugas. Jimpitan adalah aktivitas gotong royong warga masyarakat untuk membangun lingkungannya dalam bentuk iuran. Biasanya iuran tersebut bisa dalam bentuk beras ataupun uang receh. Warga yang mendapat giliran bertugas akan berkeliling mengambil jimpitan pada tempat khusus yang tersedia di depan rumah-rumah warga. Biasanya waktu pemungutannya setiap malam bersamaan dengan kegiatan ronda. Di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon, semua anggota masyarakat memegang andil dalam kesuksesan program ini, mulai dari pemberi jimpitannya, petugas pemungutnya, dan pengelolaan hasil jimpitannya.

Jimpitan

Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki pandangan yang visioner, tentang bagaimana mengatur hubungan dan saling membantu sesama dengan kesepakatan bersama membentuk kearifan lokal, yang salah satunya adalah sistem jimpitan. Jimpitan yang biasanya dijalankan dalam lingkup Rukun

Tetangga (RT), terbukti mempunyai daya guna tinggi dan bermanfaat dalam membantu warga pada khususnya warga miskin pada masa-masa paceklik.

Jimpitan merupakan tradisi kemasyarakatan yang sudah berlangsung lama dan masih banyak daerah-daerah yang mempraktikkan sistem ini. Jimpitan berasal dari kata "jimpit" yang dalam kamus Bausastra Jawa (2006) berarti "*wilonganing barang lembut nganggo pucuking driji*" atau mengambil barang lembut/kecil dengan menggunakan ujung jari. Sedangkan "jimpitan" dalam istilah yang lebih konkret berarti "*beras kang diklumpukake saka warga kanggo ragad pakumpulan desa*" atau beras yang dikumpulkan warga demi kepentingan perkumpulan desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jimpitan berarti sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai. Jimpitan adalah sejumlah barang bisa berupa uang atau beras/ketan yang dimasukkan pada sebuah wadah kecil seukuran gelas atau cangkir yang dikaitkan pada pagar rumah.

Biasanya jimpitan dipungut pada waktu ronda malam. Warga yang bertugas ronda mengambil beras (dalam jumlah sedikit) yang dikumpulkan dari setiap rumah tangga yang diletakkan di depan rumah sembari berkeliling mengawasi keamanan lingkungan. Ronda mengacu pada sebuah kegiatan mengawasi keamanan lingkungan dengan berjaga dan berkeliling di lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sekelompok warga yang biasanya dilakukan pada malam hari.

Dalam perkembangannya, di beberapa daerah mengganti beras jimpitan dengan uang agar lebih praktis dan *liquid* dalam

pemanfaatannya tanpa merubah tujuan hasil perolehan jimpitan yaitu tetap digunakan untuk kepentingan desa ataupun untuk membantu warga yang sangat memerlukan. Hasil jimpitan ini digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan kampung/dukuh/RT, baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan non-fisik dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga seperti acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, perayaan tahun baru Muharram (Suronan), atau bahkan bisa untuk kegiatan rekreasi seluruh warga dukuh/kampung/RT. Selain itu, jimpitan juga dapat difungsikan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan warga.

Pembangunan

Pembangunan seringkali hanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, padahal pembangunan memiliki arti yang luas. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Kegiatan pembangunan mutlak perlu dilaksanakan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan juga untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Setiap orang tidak dapat terlepas dari kata pembangunan. Semuanya wajib melaksanakan pembangunan demi bertahan dalam menjalani kehidupan.

Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi, dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Kebijakan ekonomi di negara-negara maju pada umumnya dirumuskan secara konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial

lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian (*natural capital*) juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah atau satu orang/kelompok masyarakat saja, namun harus dilakukan bersama-sama secara bersinergi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan akan menjadi mubazir apabila tidak adanya kesadaran, dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program tersebut.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh

pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.

Dalam rangka menyukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah membentuk beberapa lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, dan Karang Taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan definisi pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat termasuk dalam program pembangunan sumber daya manusia serta merupakan bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi penentu dalam perubahan bagi kemajuan bangsa. Pembangunan perlu secara seimbang antara aspek mental-spiritual dengan aspek fisik-materialnya, tidak mengorbankan aspek mental-spiritualnya demi pembangunan fisik-material dan atau sebaliknya. Oleh karena itu, setelah gencar membangun infrastruktur, sekarang Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersinergi dengan masyarakat dalam membangun masyarakat di lingkungannya yang bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan yaitu:

1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan;
2. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan, penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian partisipasi dengan metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan terjun langsung mengikuti kegiatan pengambilan jimpitan. Obyek penelitian ini yaitu di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2019 sampai Mei 2020.

PEMBAHASAN

Kegiatan Jimpitan Pada Masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon

Masyarakat Patemon merupakan bagian dari masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal mempunyai ciri hidup yaitu prinsip atau kaidah yang mengatur setiap anggota masyarakat dalam berinteraksi bermasyarakat untuk hidup rukun dan selaras. Eratnya hubungan antara penduduk dan kebiasaan gotong royong merupakan ciri utama masyarakat Jawa. Dalam kehidupan bermasyarakat prinsip keteraturan serta selaras dalam masing-masing masyarakat menjadi bagian penting bagi kehidupan sosio-kultural masyarakat. Nilai-nilai inilah yang tercermin dalam program jimpitan, dimana masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi dalam bergotong royong dan bahu membahu menyukseskan program jimpitan sekaligus ronda malam.

Kegiatan pengambilan jimpitan di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon sudah berjalan efektif lebih dari lima tahun. Kegiatan ini dipelopori Suparyadi yaitu Wakil Ketua RT pada saat itu, yang resah dengan kondisi keamanan di Wilayah Semarang yang rawan tindak kejahatan pencurian menjelang lebaran tahun 2014. Dengan persetujuan warga dan disahkan Ketua RT, kegiatan ronda malam mulai berjalan pada bulan April 2014 dengan sub kegiatan didalamnya adalah mengambil uang jimpitan di setiap rumah warga. Karena pengambilan uang jimpitan menjadi bagian dari kegiatan ronda, maka pengelolaan jimpitan dikelola oleh di bawah koordinator bagian keamanan.

Koordinator bagian keamanan bertugas menyusun jadwal ronda sekaligus petugas pemungut uang jimpitan. Uang jimpitan yang diperoleh setiap malamnya dicatat pada buku

laporan harian, kemudian disimpan sementara oleh ketua regu dan disetorkan kepada Bendahara RT setiap bulannya pada saat pertemuan rutin bulanan.

Jimpitan berupa uang yang pada awalnya ditentukan minimal Rp 500,- per rumah. Namun nominal ini dalam pada waktu tertentu dinaikkan menjadi Rp 1.000,- untuk suatu pembiayaan kegiatan tertentu, misalnya untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dinamika pelaksanaan ronda malam dan pemungutan uang jimpitan di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon mengalami pasang surut meskipun tetap berjalan sampai dengan sekarang ini. Pengurus RT selalu melakukan terobosan dan perubahan strategi sebagai upaya mempertahankan eksistensi kegiatan ronda dan pengambilan uang jimpitan, yaitu:

1. Menyusun jadwal petugas ronda sekaligus petugas pemungut jimpitan ke dalam 8 regu dengan jumlah anggota 5 sampai 6 orang. Dengan penerapan jadwal model ini, maka waktu atau hari jaga setiap regu akan terus berubah setiap minggunya (apabila minggu ini berjaga pada hari Senin, maka minggu depan akan berjaga pada hari Selasa). Kelebihan sistem ini adalah setiap regu akan merasa adil karena mendapatkan jadwal ronda dari hari Senin sampai dengan minggu secara bergantian;
2. Menyediakan pos kamling yang bersih dan nyaman, ditambah dengan tersedianya fasilitas televisi, dan dispenser, serta perlengkapan permainan seperti papan catur dan permainan kartu;
3. Menjalankan tata administrasi presensi ronda dan jimpitan kosong;

4. Menarik denda kepada mereka yang tidak hadir dalam ronda malam, yaitu senilai Rp 5.000,-;
5. Menyusun ulang kembali anggota regu dalam beberapa bulan sekali untuk lebih mengenal warga lain dan mengurangi kebosanan. Termasuk pelibatan anak kos dalam kegiatan pengambilan jimpitan;
6. Merubah waktu ronda malam dan pengambilan jimpitan. Pada awal kegiatan ini waktu yang ditetapkan untuk kegiatan ronda dan memungut jimpitan adalah 23.00 sampai 02.00. Waktu ini efektif berjalan selama dua tahun, kemudian diubah menjadi jam 22.00 sampai 01.00 karena untuk mengurangi kejenuhan warga. Sudah lebih dari 2 tahun ini sampai dengan masa pandemi Covid-19 waktu ronda dan pengambilan jimpitan tidak ditentukan waktunya, artinya apabila waktu telah malam petugas sudah diperbolehkan mengambil jimpitan, dan diperbolehkan langsung pulang apabila telah mengambil uang jimpitan tersebut;
7. Penggunaan uang hasil jimpitan untuk kegiatan yang berbiaya besar, sehingga warga akan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana, yang salah satunya bisa dari uang jimpitan.

Mempertahankan kegiatan jimpitan dan ronda malam lebih dari lima tahun memang bukan hal yang mudah dan penuh perjuangan. Rasa bosan masyarakat, kondisi hujan dan gangguan internal lainnya selalu menjadi tantangan dalam mempertahankan kegiatan ini. Banyak kejadian dan cerita yang mengiringi kegiatan ronda dan pengambilan jimpitan. Dengan dasar kondisi warga dan kondisi lingkungan yang relatif aman, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan bulan April

2020 kegiatan ronda dan jaga malam tidak diwajibkan, tetapi patroli malam tetap dilaksanakan untuk mengambil uang jimpitan. Pada model ini, pengurus RT membagi warga menjadi 19 regu, sehingga dalam 1 regu hanya terdapat 2 orang. Dengan kondisi yang demikian maka waktu jeda untuk tugas mengambil jimpitan setiap regunya adalah 2 sampai dengan 3 minggu. Namun, pada masa pandemi Covid-19 dimana tingkat keamanan lingkungan pada beberapa daerah terganggu, jadwal ronda malam dan pengambilan jimpitan diubah kembali seperti konsep awal. Adapun besaran uang jimpitan yang ditetapkan tidak berubah, yaitu minimal Rp 1.000,- per rumah.

Kontribusi Jimpitan Dalam Pembangunan

Penerimaan uang hasil kegiatan jimpitan akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik dan optimal. Penerimaan uang hasil jimpitan di RT 04 RW 1 Kelurahan Patemon, dalam sebulan bisa diperoleh minimal Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,3 juta. Hasil jimpitan yang diperoleh dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan fisik dan kegiatan pengembangan masyarakat. Adapun pemanfaatan uang hasil jimpitan pada RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon, diantaranya:

1. Pemeliharaan lingkungan, yang berupa perbaikan jalan, pos kamling, drainase, penerangan jalan;
2. Konsumsi rapat, dan kerja bakti;
3. Penyelenggaraan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI;
4. *Family gathering* seluruh warga ke Yogyakarta (2017 dan 2018);
5. Pembuatan sumur bor dan pendirian unit bisnis warga "Niki Tirta Rimba Bhakti" (2019).

Kegiatan jimpitan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat setempat. Di daerah lain, hasil jimpitan juga bisa dijadikan modal untuk dikelola simpan pinjam bagi warga, namun pada pelaksanaan di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon tidak digunakan untuk itu karena menghindari kejadian kredit macet. Selain hasil pemasukan uang jimpitan yang diperoleh, dari segi proses pelaksanaan kegiatan ronda malam (siskamling) dan pengambilan uang jimpitan membawa dampak positif yang banyak bagi masyarakat, diantaranya:

1. Meningkatnya sikap kekeluargaan, kerukunan, dan gotong-royong masyarakat di tengah individualisme kehidupan dunia maya;
2. Terciptanya kondisi masyarakat yang rukun, aman, dan tenteram;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan membangun lingkungan.

Jimpitan Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan

Jimpitan merupakan tradisi masyarakat yang baik untuk dipertahankan. Hal ini mengingat begitu banyak manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Dari contoh pengelolaan hasil jimpitan di RT 04 RW 01 Kelurahan Patemon tersebut di atas, menunjukkan bahwa kegiatan jimpitan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan lingkungan, baik berupa pembangunan fisik maupun sosial.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menjalankan program ini menjadi kunci utama dalam keberlangsungan program tersebut. Adanya andil yang kuat dari setiap elemen masyarakat dan juga proses pengelolaan uang yang

transparan, menjadikan setiap masyarakat dapat dengan optimal memberdayakan diri untuk berkontribusi dalam pembangunan lingkungan.

Partisipasi aktif setiap warga dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, sehingga memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Jimpitan merupakan salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat desa, dimana masyarakat berperan aktif bergotong royong dalam mengumpulkan uang jimpitan dan mengelola serta mengolah hasil jimpitan tersebut dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik di wilayahnya.

Masyarakat adalah struktur sosial kompleks yang didalamnya terdapat berbagai macam unsur sosial seperti kebiasaan lokal, budaya lokal, pengetahuan lokal, toleransi, gotong royong dan kearifan lokal. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki ciri khas yang menjadi identitas masing-masing daerah. Seperti Bangsa Indonesia yang bersifat pluralisme, juga terdiri dari berbagai macam suku budaya, adat istiadat dan agama. Dan ini menjadi pelengkap kekayaan investasi sosial nasional.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang selalu mengedepankan toleransi, berbagi dan gotong royong. Sudah tentu hal ini menjadi aset yang tidak ternilai harganya yang secara turun temurun diwariskan dan menjadi budaya yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat. Nilai luhur dari semangat berbagi, toleransi, gotong royong terimplikasi dan membudaya pada masyarakat dalam bentuk seperti pertemuan sosial, kegiatan swadaya

masyarakat, kerja bakti. Semua unsur ini menjadi modal sosial pengembangan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.

Swadaya sosial merupakan lambang keharmonisan masyarakat untuk saling membantu dan berbagi antar sesama. Swadaya sosial juga berfungsi sebagai penguatan kearifan lokal masyarakat. Bentuk swadaya sosial berbeda-beda pada setiap daerah dan kondisi, seperti swadaya sosial dalam membangun rumah warga, swadaya sosial dalam memanen padi ketika musim panen, swadaya pembangunan fasilitas umum (tempat ibadah, pos kamling, dan lain sebagainya), serta swadaya memenuhi kebutuhan hidup seperti arisan, dan program jimpitan.

PENUTUP

Jimpitan merupakan tradisi kegiatan pengumpulan sesuatu, biasanya berupa uang atau beras, yang dilakukan dari rumah ke rumah yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang jelas dan transparan, dana jimpitan akan memberikan manfaat yang banyak bagi pembangunan lingkungan. Besarnya dampak positif yang ditimbulkan menyebabkan tradisi jimpitan layak untuk dilestarikan.

Tradisi jimpitan masih membudaya hingga saat ini pada beberapa daerah. Budaya ini mengakar turun temurun sehingga menjadi penguat jati diri bangsa. Nilai-nilai kepedulian antar sesama yang terkandung didalamnya membuktikan rasa solidaritas menjadi salah satu unsur penguat dalam kebinekaan bangsa. Rukun Tetangga (RT) menjadi lingkup terkecil yang bisa langsung menggerakkan masyarakat untuk ikut membangun kebudayaan jimpitan

ini. Apabila seluruh desa dan kelurahan menggalakkan kembali budaya jimpitan ini, semua masyarakat akan merasa semakin peduli dan terikat satu sama lain sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan sosial yang dirasakan oleh individu akan menjadi beban moral dan tanggung jawab bersama masyarakat. Masyarakat akan lebih memiliki rasa empati antar sesama dan peduli apabila ada warganya sedang mengalami permasalahan.

Saran

Besarnya dampak positif yang ditimbulkan dari tradisi kegiatan jimpitan maka ini sangat layak untuk ditiru oleh masyarakat daerah lain atau bahkan bisa menjadi gerakan nasional. Kejenuhan pasti akan datang pada pelaksanaan jimpitan, oleh karena itu perlu adanya strategi dan inovasi secara periodik sesuai dengan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat.

Harapan terakhir dari menghidupkan kembali kearifan lokal seperti jimpitan ini adalah upaya menumbuhkan dan melestarikan nilai kesadaran untuk peduli, berbagi dan toleransi antar sesama. Kekuatan ini yang menjadi modal besar dalam membentuk masyarakat berketahanan sosial. Pemerintah dan masyarakat hendaknya bersama-sama lebih peduli dengan lingkungan sekitar dengan melestarikan budaya lokal seperti kegiatan jimpitan. Kemajuan zaman bukan menjadi alasan untuk meninggalkan nilai dan budaya luhur yang menjadi ciri khas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2017). Teori Partisipasi: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam

- Pembangunan Menurut Para Ahli. Available at: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>.
- Badrudin, S. (2017). Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. H. Syamsiah Badrudin, M.Si. Available at: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-profdrhsyamsiah-badrudinmsi-20>.
- Bagaskara, W. (2017). Jimpitan sebagai Mekanisme Redistribusi dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Hamzah, A. C. (2019). Mengulik Makna Tradisi Jimpitan. *Good News from Indonesia*. Available at: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/02/23/jimpitan>.
- Hanafi, Z. Q. (2016). Kegiatan Jimpitan Ronda sebagai Modal Sosial Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi di RW 04 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: DPR RI.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: DPR RI.